

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam sebuah forum Trading Development and Gender Equality yang berlangsung di sela Asian Development Bank Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji, pada Sabtu 4 Mei 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) menyebutkan bahwa kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investigasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan mereka.

Hal ini didukung oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang ikut mendorong berbagai komunitas dunia untuk memperkuat status perempuan dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai upaya dilakukan oleh dunia internasional salah satunya dengan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang mewajibkan negara-negara anggota menyelaraskan undang-undang negara mereka dengan hukum internasional yang terkait dengan pelarangan tindak kekerasan berbasis gender.

Direktorat Jendral Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Indonesia keseluruhan sebanyak 272,23 juta jiwa pada 30 Juni 2021. Sebanyak 137,52 juta jiwa berjenis kelamin laki laki (50,5 %) dan 134,71 (49,5%) berjenis

kelamin perempuan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa presentase perempuan dan laki-laki di Indonesia hampir seimbang, sehingga seharusnya keterlibatan dan partisipasi perempuan ikut berperan penting dalam proses pembangunan masyarakat di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dijelaskan pada table jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta semester II 2021 menurut jenis kelamin, berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kota/ Kabupaten	Jumlah Penduduk		
	L	P	L+P
<b>Kulon Progo</b>	219.347	223.527	442.874
<b>Bantul</b>	476.315	480.198	956.513
<b>Gunungkidul</b>	383.336	391.105	774.441
<b>Sleman</b>	538.827	549.282	1.088.109
<b>Kota Yogyakarta</b>	202.575	212.934	415.509
<b>Jumlah</b>	1.820.400	1.857.046	3.677.446

*Sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi perempuan di D.I. Yogyakarta sangat besar melihat secara jumlah lebih banyak daripada jumlah laki-laki, sehingga seharusnya potensi ini dapat dimaksimalkan dalam proses pembangunan desa. Namun, pentingnya keterlibatan dan kontribusi perempuan ternyata tidak memberikan jaminan atas kesempatan diperlakukan sama dan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki di bidang social, politik, ekonomi, dan bidang lainnya.

Dalam acara sarasehan DPRD DIY yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2020, Renny Anggriana Frahesty Direktur Yayasan Narasita Jogja menyebutkan bahwa komposisi pekerja formal laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2018 adalah 61% banding 39%., dan pada sektor informal laki-laki 51% dan perempuan 49%. Hal inilah yang membuat kesenjangan upah laki-laki dan perempuan di DIY, dimana upah perempuan hanya berkisar 36%-76% dari upah laki laki. Beliau menambahkan bahwa dari 271,438 orang pekerja yang tidak dibayar, 79,6% diantaranya adalah perempuan. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya posisi dan peran perempuan dalam bermasyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membuka ruang dan memberikan jaminan hukum terhadap partisipasi warga dalam proses pembangunan desa. Dengan ini masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya tanpa terkecuali termasuk kelompok kelompok minoritas seperti kelompok perempuan. Namun dalam peraktiknya, terdapat berbagai faktor yang menghambat partisipasi perempuan untuk terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan desa lainnya.

Di dalam kehidupan sehari- hari perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadi kaum yang terpinggirkan dan dianggap sebagai kelompok kelas kedua atau subordinat yang berada dibawah laki-laki, sehingga terjadi pemisahan ranah publik untuk laki laki dan privat untuk perempuan. Pentingnya

peran dan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan masyarakat di Indonesia serta berbagai kasus diskriminasi dan perampasan hak perempuan mampu menyadarkan pemerintah untuk turun tangan dalam menjamin kesetaraan hak bagi perempuan di berbagai bidang. Pemenuhan dan terjaminnya kesetaraan hak setiap warga negara termasuk kelompok perempuan serta melakukan program pemberdayaan guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat menjadi perwujudan dari fungsi pemerintah. Hal ini membuat pemerintah berkomitmen untuk mencegah gender stereotip dan memberikan ruang terbuka bagi perempuan di berbagai bidang.

Peran pemerintah sebagai penyedia layanan dan didukung dengan fungsi pemberdayaan merancang pengembangan strategi pemberdayaan perempuan berskala nasional dengan penguatan organisasi- organisasi yang bersinggungan atau berfokus pada isu gender dan pemberdayaan kelompok perempuan. Besarnya beban kerja yang ditanggung pemerintah dalam pemberdayaan perempuan menjadi alasan pentingnya mengikutsertakan stakeholder yang ada, salah satunya dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wujud dari hadirnya Civil Society di Indonesia untuk memaksimalkan rencana pemberdayaan perempuan di Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat menjadi lembaga non pemerintah yang cukup diunggulkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dari wilayah paling kecil dengan pihak-pihak yang ter subordinasi seperti kaum perempuan misalnya.

Peran Lembaga Swadaya masyarakat tidak lagi bisa dipandang sebelah mata, sehingga peran dari Lembaga swadaya masyarakat (organisasi non-pemerintah) yang melakukan pemberdayaan perempuan untuk membantu kaum perempuan mencapai kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik menjadi hal yang strategis. Dengan demikian sasarannya ditujukan untuk mengembangkan dan mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan (Biro Pemberdayaan Perempuan Kementerian Peranan Wanita, 2007).

Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan yaitu LSM Solidaritas Perempuan Kinasih. Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan lahir sebagai organisasi feminis di Indonesia sejak 10 Desember 1990 dan hingga tahun 2015 sudah menjadi 11 komunitas atau cabang yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta. LSM Solidaritas Perempuan memiliki kontribusi dan peranan yang besar dalam mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Solidaritas Perempuan Kinasih memiliki beberapa daerah mitra binaan salah satunya ialah Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul DIY. Berbagai program dirancang dan dilakukan dalam upaya pemberdayaan perempuan yang berfokus pada pendidikan perempuan dan penyadaran peran-peran penting sebagai perempuan untuk mewujudkan perempuan yang berdaulat. Pendidikan perempuan ini yang memberikan ilmu dan penyadaran terhadap peran penting keterlibatan perempuan dalam pembangunan Desa. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Kinasih untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah bagaimanakah peran Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Kinasih untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Kinasih untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan

dalam Pembangunan Desa di Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan dalam bidang kajian lembaga swadaya masyarakat serta perempuan dan gender.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan membantu penelitian selanjutnya.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis, sebagai pembelajaran untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki baik secara teori maupun praktek dalam mengembangkan kajian tentang gender dan perempuan.
- b. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Kinasih dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan optimalisasi penyelenggaraan program selanjutnya.
- c. Untuk Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu membuka pemahaman masyarakat terhadap permasalahan gender dan perempuan.

- d. Untuk Pemerintah agar dapat dijadikan pertimbangan agar pemerintah lebih memperhatikan isu yang berkaitan dengan perempuan dan gender sehingga mampu membantu mewujudkan kesetaraan hak dalam berbagai aspek kehidupan.

## 1.5 Kajian Pustaka

Penulis memaparkan kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Dari berbagai hasil kajian dibawah ini dapat diperoleh informasi bahwa ide dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian yang relevan dengan Peran LSM dalam peningkatan partisipasi perempuan serta partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dapat ditemukan pada beberapa literatur seperti dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Kajian Pustaka**

No	Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Syarifah, 2019)	Peran Lembaga Solidaritas Perempuan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya	Proses pendampingan yang diberikan oleh Lembaga Solidaritas Perempuan baik advokasi kasus melalui litigasi dan non-litigasi maupun advokasi kebijakan menjadi penghubung ke sumber sosial yang mendukung maupun keluarganya.
2.	(Tiara & Tane, 2020)	Peran Organisasi Perempuan dalam Pembangunan: Studi	Peran dari masing-masing organisasi perempuan sudah menunjukkan ke arah pembangunan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan



		di Nagari Canduang Koto Laweh	kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan. Selain itu, upaya organisasi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dilakukan melalui pemberian motivasi, koordinasi dan komunikasi, serta melaksanakan tugas pengawasan.
3.	(Iga, 2019)	Peran LSM Mitra Wacana WRC (Woman Resource Center) Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Di Desa Hargorejo, Kokap, Kulonprogo)	Peran LSM Mitra Wacana dalam pemberdayaan perempuan di Desa Hargorejo sangat berpengaruh untuk memperluas ruang gerak perempuan di masyarakat yaitu ikut serta dalam pembangunan desa dan meningkatkan kemandirian.
4.	(Kiromim, 2018)	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi Kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)	Peran LAPY dalam memberdayakan perekonomian perempuan melalui <i>life skill</i> dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan menjahit sampai permagangan dan pemberian modal usaha. Disini peran LAPY adalah sebagai fasilitator dan motivator.
5.	(Ema & Kaslam, 2021)	Aktivisme Non Government Organization Dalam Menciptakan Kesetaraan Gender ( Studi Kasus Peran Econatural Society Dalam Pemberdayaan Perempuan)	Salah satu aspek yang menjadi kunci dalam proses menuju kesetaraan gender adalah pemberdayaan perempuan. Econatural Society dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator, dan telah berhasil menjadi satu lembaga yang mendorong gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, juga dalam bidang lingkungan, sosial serta kemanusiaan sehingga menciptakan kesetaraan gender.

6.	(Ahmad, 2018)	Aktivisme, Filantropi Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta.	Dinamika YSI menjadikannya lebih efektif dalam mengembangkan kapasitas dan memediasi perempuan untuk mengakses pelayanan publik. Program-program produktif yang digerakkan YSI terus digalakkan untuk membentuk kemandirian ekonomi perempuan di Yogyakarta.
7.	(Suci, 2018)	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan Dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta.	Solidaritas Perempuan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran dalam advokasi kebijakan pengelolaan air di Jakarta, yakni sebagai tim kerja basis yang bekerja melakukan pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat serta berperan di dalam pengelolaan data dan informasi yang digunakan untuk menunjang advokasi non litigasi dan kampanye.
8.	(Okta, 2021)	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan Palembang dalam Program Perempuan Berkeadilan Agraria di Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.	Peran LSM Solidaritas Perempuan Palembang dalam program perempuan berkeadilan agraria yaitu membantu dengan membina dan memfasilitasi perempuan akar rumput di Desa Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir agar mampu memperjuangkan kesetaraan dan keadilan hak melalui pengorganisasian, advokasi, dan kampanye.
9.	(Nanik, 2016)	Peran LSM Kebaya (Keluarga Besar Waria Yogyakarta) dalam Memberdayakan Waria.	LSM Kebaya (Keluarga Besar Waria Yogyakarta) berupaya memberdayakan waria dengan program-program pengembangan seperti pendampingan serta diberikan bekal ketrampilan dan

			wirausaha melalui berbagai pelatihan.
10.	(Yuanita & Luluk, 2017)	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pembangunan cukup besar. Berbagai bentuk partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam bentuk pikiran, dana, tenaga, kas swadaya dan lainnya. Padahal secara kuantitas, tidak ada aparat pemerintah desa dari perempuan, semuanya didominasi laki-laki.
11.	(Abdul, 2018)	Studi Deskriptif Peran Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Mataram.	Perempuan terlibat aktif dalam musyawarah yang dilakukan di Kota Mataram terkait pembangunan salah satunya adalah keterlibatan perempuan dalam Musrenbang. Bahkan dalam Musrenbang komisi-komisi sosial budaya paling banyak dihadiri oleh perempuan. Hal ini karena dirasa perempuan memiliki lebih keahlian dalam komisi sosial-budaya.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan di atas sebagian peneliti mengkaji tentang peran advokasi dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh LSM Perempuan sedangkan sisanya mengkaji tentang partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji dan berfokus pada peran LSM Solidaritas Perempuan Kinasih untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif

deskriptif untuk menguraikan bagaimana peran dan strategi LSM Solidaritas Perempuan Kinasih dalam melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di Desa Wonolelo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.6 Karangka Teori**

### **1.6.1 Peran dan Fungsi Pemerintah**

#### **1. Teori Peran**

Perkembangan teori peran terus terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan banyaknya kajian yang dilakukan. Teori peran awalnya digunakan di perspektif sosiologi dan psikologi sosial. Tetapi, kemudian berkembang menjadi kajian politik karena berkaitan dengan perilaku yang bertindak untuk tujuan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1998, 854).

Menurut (Soejono Soekanto 2002:243), peran adalah suatu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, dan dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kedudukan dalam masyarakat, maka ia pun melaksanakan suatu perannya tersebut dengan memperhatikan hak dan kewajibannya (Soekanto, 1998: 220). Soerjono (2010) membagi peran ke dalam 3 unsur, yaitu:

- a. Peran ideal, merupakan peran yang diharapkan oleh masyarakat yang kemudian termanifestasikan ke dalam hak dan kewajiban yang terkait pada status tertentu.
- b. Peran yang dianggap oleh diri sendiri. Peran ini merupakan hal yang harus dilakukan individu pada situasi tertentu.
- c. Peran yang dilaksanakan, yakni peran yang dilakukan oleh individu dalam perilaku nyata dan sangat dipengaruhi oleh kepribadian pelaku.

Peran juga mampu membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran adalah: a. Memberi arah pada proses sosialisasi; b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan; c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; d. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (Narwoko dan Suyanto 2011: 159)

Sedangkan menurut Soejon, yang dimaksud peran dalam konteks organisasi adalah kegiatan organisasi yang menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang sudah ditetapkan, sehingga kajian ini berpijak pada mekanisme kerja suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang menjadi ketetapan suatu organisasi.

## 2. Peran dan Fungsi Pemerintah

Ndraha (2003: 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Pemenuhan dan terjaminnya kesetaraan hak setiap warga negara guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat menjadi perwujudan dari fungsi pemerintah. Menurut Ndraha (2003:85) fungsi pemerintah diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi yaitu:

- a. Fungsi Primer yang merupakan fungsi pokok dari pemerintah yaitu; 1) Fungsi Pelayanan, dalam kehidupan bernegara pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan lainnya. 2) Fungsi Pengaturan, pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan agar stabilitas negara terjaga, dan masyarakat dapat hidup dengan peraturan yang mengikat.
- b. Fungsi Sekunder menjadi fungsi yang mendukung dari maksimalnya peran pokok pemerintah, fungsi sekunder pemerintah diantaranya; 1) Fungsi Pembangunan, dinegara berkembang seperti Indonesia pemerintah menjadi

pemacu pembangunan yang mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya pembangunan fisik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Fungsi Pemberdayaan, pemberdayaan dilakukan pemerintah agar masyarakat memiliki skill ataupun kemampuan yang memadai untuk mengelola sumber daya yang ada demi memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap pemerintah.

#### 1.6.2 Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

##### 1. Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut *Indonesian Center for Civic Education (ICCE)*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar pengaruh negara dan merupakan perwujudan dari *civil society*. Menurut Muhammad As Hikam dalam bukunya *Demokrasi dan Civil Society* mengatakan bahwa *civil society* adalah satu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku atau tindakan yang tidak terkukung oleh kondisi material dan tidak terserap di dalam jaringan lembaga lembaga-politik resmi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu organisasi atau kelompok independen yang beraktifitas diluar struktur politik.

Jordan dan Peter mengatakan bahwa LSM melekat pada *civil society* yang berbeda dari masyarakat politik lainnya sehingga tidak bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan negara seperti partai politik. Kerja LSM lebih kepada aktivitas pelayanan dan advokasi untuk mengangkat isu-isu tertentu (Jordan dan Peter, 2009:13)

## 2. Karakteristik Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM yang lekat dengan *civil society* memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Menurut Tocqueville yang dikutip dalam (Azra, 1999), menyebutkan beberapa karakteristik *civil society* yaitu berasaskan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma yang diikuti oleh warganya. Sedangkan menurut (Clark, Abidin dkk, 2004), karakteristik LSM yakni lembaga non birokratis, bersifat sukarela, kegiatan tidak berorientasi pada keuntungan dan LSM bekerja untuk melayani masyarakat umum, bukan anggota atau aktivitasnya sendiri.

## 3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Hikam, LSM melakukan berbagai misi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, pembelaan, dan penyadaran sekaligus penyebarluasan pelaksanaan program untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat maupun memberikan



pembelaan kepada masyarakat agar hak-hak dasarnya dipenuhi oleh negara (Hikam, 1999:200).

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Ismail Hadad dalam (Suci, 2018), diantaranya:

1. Memberikan motivasi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai masalah yang dihadapi diri dan lingkungannya
2. Berperan sebagai fasilitator dalam memberikan bantuan teknis pelaksanaan suatu program seperti penyediaan dana dan peralatan yang menjadi kebutuhan masyarakat
3. Berperan sebagai komunikator yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjelaskan tentang program atau kebijakan pemerintah kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami

Penulis berfokus pada peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat akar rumput (*grassroots*) yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai hal yang sedang dihadapi diri dan lingkungannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kelompok perempuan yang diberikan motivasi dan penyadaran diri atas apa yang mereka alami di masyarakat.

### 1.6.3 Pemberdayaan Perempuan

#### 1. Pemberdayaan

##### a. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Menurut Kartasmita dalam Totok dan Soebianto (2015:53) mendefinisikan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Mardikanto dan Soebianto (2015:61) juga berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut: 1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan; 2) Memberdayakan

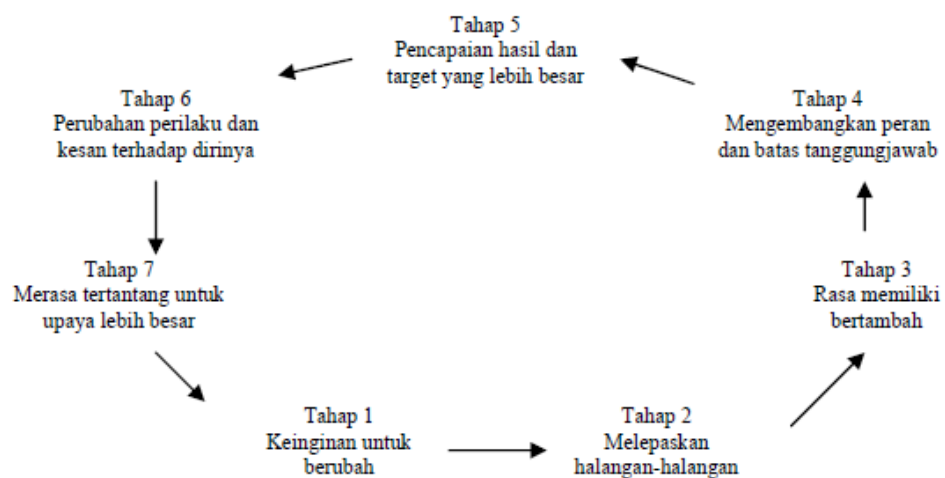
kelompok - kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

b. Tahap/ Proses Pemberdayaan

Terry Wilson mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari 7 tahapan yaitu: *Tahap pertama*, keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. *Tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam diri dan komunitasnya. *Tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat*, upaya untuk mengembngkna peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, hal ini berkaitan dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. *Tahap kelima*, peningkatan rasa memiiki yang besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. *Tahap keenam*, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, ketika keberhasilan dalam peningkatan kerja mampu meningkatkan

perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. *Tahap ketujuh*, masyarakat sudah berhasil memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

**Gambar 1.1**  
**Siklus Pemberdayaan Masyarakat Menurut Wilson**



*Sumber: Wilson, 1996*

## 2. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan menurut Keller and Mbweve (1991), merupakan suatu proses dimana perempuan mampu mengatur dirinya sendiri untuk meningkatkan kemandirian diri, menegaskan hak hak independen mereka untuk membuat pilihan dan untuk mengontrol sumber daya yang akan membantu dalam menentang dan menghilangkan subordinasi mereka sendiri. Sedangkan menurut Aritonang (dalam Ihromi, et al, 2000:142-143) pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan

perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber- sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang.

Hasil pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto, pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok renta dan lemah yaitu perempuan sehingga mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan tingkat partisipasi.

#### 1.6.4 Partisipasi Perempuan

##### 1. Definisi Partisipasi

Menurut Davis didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya. H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

## 2. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004 adalah:

- 1) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- 4) Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- 5) Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

- 6) Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- 7) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia

### 3. Konsep Partisipasi Perempuan

Partisipasi/ keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan, artinya masyarakat ikut berpartisipasi/ keterlibatan dalam pembuatan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta turut bertanggungjawab. Penelitian ini lebih cenderung untuk mengadopsi pemahaman partisipasi menurut logika pemberdayaan, (Lund, S, 1990:178-179). Lebih rinci Cohen dan Uphoff (Irene, 2011: 61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

*Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.



Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

*Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

#### 1.6.5 Pembangunan

Tjokroamidjojo dan Musropadidjaja (1998) memberikan definisi bahwa pembangunan adalah terjadinya suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, social budaya, dan politik. Siagian (1996) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Sedangkan Mansour (2002) menyatakan bahwa pembangunan dapat

diinterpretasikan dalam dua kategori berdasarkan pengertian yaitu: 1) Pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia; 2) Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana.

Dampak dari partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan menurut Abe (dalam, Fadil, 2013) adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat. 2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan program masyarakat. 3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1.7.1 Peran Pemerintah**

Pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat dimana pemenuhan dan terjaminnya kesetaraan hak setiap warga negara guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat menjadi perwujudan dari fungsi pemerintah. Pemerintah juga sebagai pengatur kehidupan masyarakat bersamaan dengan menjamin dan menjaga kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 1.7.2 Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai bagian dari *civil society* merupakan lembaga independent yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat dan terlepas dari keterikatan dengan pemerintah, yang berasaskan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian tinggi. Lembaga Swadaya Masyarakat berfokus kepada aktivitas pelayanan dan advokasi dengan melakukan penguatan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput dan kelompok masyarakat yang termarginalkan melalui berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di berbagai bidang.

### 1.7.3 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah upaya untuk mampu meningkatkan kemandirian kelompok perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi agar mampu memaksimalkan kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki untuk mengelola sumber daya yang ada. Pemberdayaan Perempuan diharapkan mampu memberikan kebebasan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, dapat menjangkau pekerjaan dan pendapatan yang layak dan setara di dunia kerja, serta tetap berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat.

### 1.7.4 Partisipasi Perempuan

Perempuan menjadi salah satu actor penentu dalam proses pembangunan sehingga partisipasi dan keterlibatannya menjadi penting.

Partisipasi atau keterlibatan perempuan sangat diperlukan artinya perempuan harusnya terlibat dalam pembuatan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta turut bertanggungjawab.

#### 1.7.5 Pembangunan

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, social budaya, dan politik yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Pembangunan sebagai upaya menuju tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang semakin baik seiring dengan perkembangan zaman.

### 1.8 Definisi Operasional

Berikut terkait dengan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.3**  
**Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan	Strategi Pemberdayaan oleh LSM	Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh LSM dalam upaya pemberdayaan perempuan.
	Program Pemberdayaan Kelompok	Untuk mengetahui program pemberdayaan yang dilakukan oleh

	Perempuan oleh LSM	LSM dalam untuk meningkatkan partisipasi perempuan.
	Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan</li> <li>2. Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Program</li> <li>3. Keterlibatan Perempuan dalam Monitoring dan evaluasi program pembangunan desa</li> </ol>
	Faktor yang mempengaruhi tingkat Partisipasi Perempuan	Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam proses pembangunan desa

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mampu mengurai interaksi sosial yang kompleks dan akan menemukan pola pola hubungan yang jelas antara aktor/ orang, dengan aktivitas/ kegiatan dan tempat (Sugiyono: 2007). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis yang meliputi relasi, interaksi, komunikasi, dan peran. Metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis nantinya akan menghasilkan data yang lebih lengkap, mendalam, dan bermakna dalam mengartikan interaksi sosial sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

### 1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Kinasih yang terletak di Jln. Godean Km. 6,5 Cokrobedog RT 06, RW 12, Cokro Gedok, Sidoarum, Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55264 dan Mitra Binaan LSM Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta yaitu Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta. Penulis memilih lokasi penelitian diatas karena segala kegiatan dan narasumber beserta dokumen dokumen yang nantinya akan membantu dalam melengkapi data penelitian dapat didapatkan disana.

### 1.9.3 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana sumber data utamanya berbentuk kata-kata dan tindakan serta terdapat data-data tambahan sebagai penguat analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada para informan terkait dengan internal organisasi LSM Solidaritas Perempuan Kinasih, strategi dan program apa saja yang berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan serta realisasi program di lapangan beserta dengan factor penghambat dan factor pendukung program. Data

lainnya seperti prinsip-prinsip partisipasi dan tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Wonolelo termasuk faktor - faktor yang mempengaruhinya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi baik dari media massa, dan media cetak. Data Sekunder yang dibutuhkan berupa kajian-kajian terkait dengan kegiatan pengorganisasian, pemberdayaan perempuan, peran dari LSM Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta, Sejarah Solidaritas Perempuan Kinasih, Struktur Organisasi SPK, Database Anggota SPK, Ad/Art Solidaritas Perempuan Kinasih, Jaringan/ Kerjasama Organisasi dan berita terkait partisipasi dan keterlibatan perempuan serta berita ataupun *press release* kegiatan yang telah atau sedang dilakukan oleh LSM Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2007). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data untuk menggali lebih dalam masalah penelitian yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara diperlukan untuk mengumpulkan data primer dengan bantuan dari narasumber. Wawancara dilakukan oleh penulis terhadap narasumber secara tatap muka dan mendalam. Wawancara yang digunakan termasuk ke dalam jenis purposive sampling di mana peneliti memilih informan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu Sana Ulaili (Ketua LSM Solidaritas Perempuan Kinasih), Dina Herdiana (Koordinator Program Badan Eksekutif Komunitas SPK), Aniati Tokomadoran (Staff Divisi Media Kampanye SPK), Nuning Rukhmawati (Koordinator Divisi Penguatan Organisasi SPK), Ibu Hartini (Perempuan Kecamatan Pleret), Khulil Khasanah (*Community Leader* perempuan Desa Wonolelo, Pleret).

**Tabel 1.4**  
**Tahap Wawancara**

<b>NO</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1.	Sana Ulaili (Ketua LSM Solidaritas Perempuan Kinasih)	24 Mei 2022
2.	Aniati Tokomadoran (Staff Divisi Media Kampanye SPK)	25 Mei 2022
3.	Ibu Hartini (Staff Divisi Pengorganisasian SPK)	30 Mei 2022
4.	Nuning Rukhmawati (Koordinator Divisi Penguatan Organisasi SPK)	1 Juni 2022



5.	Nuning Rukhmawati (Koordinator Divisi Penguatan Organisasi SPK)	8 Juni 2022
6.	Khulil Khasanah ( <i>Community Leader</i> Perempuan Desa Wonolelo).	17 Juni 2022
7.	Dina Herdiana (Koordinator Program Badan Eksekutif Komunitas SPK)	22 Juni 2022
8.	Khulil Khasanah (Perempuan Desa Wonolelo).	13 Juli 2022

Sumber : Dokumen Observasi Penulis

b. Pengamatan( Observasi)

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Metode ini dilakukan oleh penulis melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek penelitian, termasuk situasi dan kondisi secara langsung. Kegiatan yang dilakukan saat observasi yakni pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan internal yang dilakukan oleh SP Kinasih di Kantor sekretariat dan perilaku perempuan di Desa Wonolelo Pleret Bantul.

**Gambar 1.2**  
**Rapat Perencanaan Program bersama DPK, BEK, dan Staff**  
**pada 1 Juni 2022**



*Sumber : Dokumen Observasi Penulis*

Pada tanggal 1 Juni 2022, penulis berkesempatan untuk menghadiri dan mengamati rapat perencanaan program bersama dengan Dewan Pengamat Komunitas, Badan Eksekutif Komunitas, dan Staff Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta. Penulis melakukan pengamatan bagaimana jalannya rapat dan keterlibatan perempuan dalam forum rapat internal komunitas ini.

c. Dokumentasi

Metode yang didapat dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data pendukung yang membantu menguatkan data yang didapatkan oleh penulis di lapangan. Beberapa informasi dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi atau data yang tersedia bisa berbentuk surat, laporan, foto kegiatan, arsip, notulensi rapat, catatan lapangan dan audio

wawancara. Data-data yang diperlukan berupa Sejarah Solidaritas Perempuan Kinasih, Struktur Organisasi SPK, Database Anggota SPK, Ad/Art Solidaritas Perempuan Kinasih, draft kegiatan pengorganisasian di Desa Wonolelo, notulensi kegiatan bersama perempuan Desa Wonolelo dan lainnya.

#### 1.9.5 Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

##### a. Reduksi data

Penulis melakukan pengelompokan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi atau pengamatan di lapangan. Data mentahan yang didapatkan di lapangan pastinya sangat kompleks dan rumit sehingga perlu dikelompokkan dan difokuskan. Penulis dalam mereduksi data yaitu dengan mentranskrip wawancara, kemudian dari transkrip wawancara tersebut penulis merangkum dan memilih data

berdasarkan pada pertanyaan yang sesuai dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Penyajian data

Setelah merudiksi data maka penulis akan mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono : 2007). Dengan mendisplaykan data, maka akan akan mempermudah penulis untuk memahami dan mencari tahu permasalahan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan dari temuan yang sudah pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono: 2007). Dalam penarikan kesimpulan, penulis memperhatikan tujuan rumusan masalah dan tujuan penelitian kemudian dihubungkan dengan data lapangan dan teori yang digunakan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

